

EPIDEMI KORUPSI DALAM PALAGAN KEPENTINGAN IDEOLOGIS:

Quo vadis Indonesia?

Valentinus Saeng

STFT Widya Sasana, Malang

Abstract

Most people think until now that the problem of corruption is rooted in subject's incapacity to internalize ethical and moral teachings. Analyzing critically relations and interactions between nations that is loaded with universe of interest, public understanding of corruption must be changed. The issue of corruption goes beyond the ethical-moral and psychological sphere. The corruption today has been transformed into an instrument of domination and of ideological struggle. It belongs integrally to neo-colonialism and neo-imperialism strategy of domination and exploitation.

Keywords: Korupsi, Ideologi, Logika Dominasi, Sosial Media, Komunisme.

Panggung Republik Indonesia terus disuguhi kisah tragis korupsi yang dilakoni oleh kaum elit bangsa.¹ Babak demi babak tampil di layar kaca dan halaman koran dengan tokoh yang semakin beragam: mulai dari kalangan pengusaha hingga rakyat biasa, dari komunitas cerdas pandai sampai mereka yang berkecimpung di partai, dari kalangan eksekutif dan legislatif hingga yudikatif. Semua lembaga negara dan segenap strata sosial telah terwakili sebagai pemeran dalam lakon korupsi yang dipentaskan di panggung raksasa bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Yang pasti: dalam setiap babak pasti terjadi kegaduhan hebat di seluruh Nusantara, karena ada yang pro dan yang kontra seturut kepentingan masing-masing.

1 Kajian kritis ini merupakan modifikasi dan elaborasi lebih lanjut dari karya tulis penulis yang berjudul "Ketahanan Nasional dapat mencegah banalitas korupsi yang menjadi alat ideologi neo-liberal-kapitalis" ketika mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), PPRA XLIX 2013.

Para pemain lakon korupsi itu ada yang tersandung “dana anggaran siluman”, tertangkap karena “fulus pengemplang pajak”, terjerat komisi “pengadaan Buku Suci”, korban “tawar menawar perkara di pengadilan”, terjebak dalam “alat simulator”, tersedak oleh “daging impor” serta tertimpa bangunan “rumah atlet”, geger-gegeran antar-institusi penegak hukum akibat kasus “rekening gendut berjumlah miliaran”, karir politik yang gembos sebab terlibat “pengaturan perkara dana Bansos (Bantuan Sosial)” dan suguhan terakhir, ribut-ribut – adu mulut antar-pengikut karena “kasus saham Freeport”. Jumlah pelakon dapat bertambah lagi kalau kasus yang terjadi di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia diikutsertakan.

Secara terang benderang praktik korupsi menggerogoti semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tiada wilayah kontak sosial atau ruang publik, terutama dalam relasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan mulai dari level terendah di daerah terpencil hingga lembaga tertinggi di pusat pemerintahan terbebas dari perilaku korup.

Pertanyaan mendasar adalah apakah korupsi merupakan fenomena sosial yang sekedar disebabkan oleh kekurangan pendidikan etika-moral? Atau persoalan korupsi yang begitu menggurita memiliki dimensi politis-ideologis sehingga memerlukan penjelasan secara berbeda? Tulisan ini mencoba menelisik fenomena korupsi dari sudut kritik ideologi.

1. Korupsi sebagai Alat Dominasi

Banyak analisa dipapar dan bertumpuk argumentasi diumbar untuk menjelaskan mengapa korupsi semakin mengakar dan kesadaran moral begitu memudar.² Atas sikap biasa dan tanpa dosa kaum tersangka bermacam alasan dikemukakan. Ada yang menyoroti dari aspek psikologi dan ada pula yang menyodorkan unsur tradisi, tapi berujung pada lagu lama: koruptor sudah tidak lagi dihinggapi beban hati karena nurani sudah mati. Namun kematian nurani bukanlah *ratio essendi* dari fenomena tanpa rasa bersalah yang diekspresikan para pelaku, mengingat mereka adalah orang yang peduli dan punya hati untuk anak dan istri, sahabat dan kerabat, keluarga dan sanak-saudara; kematian nurani merupakan sebuah konsekuensi turunan atau hasil akhir. Secara substansial akar dari epidemi korupsi yang terjadi di Indonesia lebih baik jika dicari di

2 Beberapa buku yang mengupas masalah korupsi terutama dari perspektif etika dan moral: Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Penerbit Kompas 2009; Kompas, *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009; Kompas, *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.

medan pertarungan atau palagan ideologi global kontemporer. Asumsi penulis, kita mesti menempatkan persoalan korupsi dalam logika dominasi.³

Landasan teoretis untuk menganalisa penyakit korupsi yang begitu mewabah di seluruh dunia dan terutama di Indonesia dalam konteks pertarungan ideologi dapat ditemukan dalam pemikiran Herbert Marcuse. Ada dua hal dari pemikiran Marcuse yang dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk meneropong persoalan korupsi, yaitu a) keberadaan kebutuhan sejati (*true need*) dan kebutuhan palsu (*false need*)⁴ dan b) rekayasa masyarakat konsumen (*consumer society*) yang didesain dan dipaksakan oleh kekuasaan *status quo* ke seluruh dunia.⁵

Kategori “sejati” dan “palsu” sama sekali tidak terletak pada kualitas produk dan kelayakan untuk dikonsumsi, tetapi pada muatan nilai yang dimasukkan secara sengaja di dalamnya oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan. Selain itu, politik rekayasa yang dilakukan oleh regim ideologi kapitalis untuk menciptakan masyarakat konsumen global semakin memperkuat kecurigaan kita bahwa epidemi korupsi di dunia dan Indonesia berada dalam konteks politik rekayasa tersebut. Dengan kata lain, perilaku histeris massa ketika berada di depan produk, gaya hidup konsumeristik dan hedonis bukanlah bawaan sejak lahir (*innative*), melainkan hasil dari proses internalisasi yang dilakukan secara terprogram, kontinyu dan terpadu melalui beragam aktivitas propaganda. Jadi, kebutuhan hidup pun dapat dialihfungsikan sebagai instrumen dominasi dan eksploitasi oleh kekuasaan *status quo* lewat pembatinaan aneka doktrin dan nilai tertentu.

Secara sosio-politik-ideologis, epidemi korupsi bertali-temali dengan *credo* konsumerisme-hedonisme dan perilaku konsumtif-hedonis. Orang yang korupsi merupakan pribadi yang tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Keinginan dan kerakusannya sedemikian besar, sehingga ia terus berupaya menggarap dan melahap apa saja yang ada di sekitarnya tanpa peduli dengan batasan nilai etis-moral dan logika kepantasan. Ketidacacuhan terhadap sistem nilai menandakan bahwa subyek sudah tidak mampu lagi membedakan secara kritis mana yang hakiki dan mana yang sampingan, yang benar dan keliru, baik atau buruk, sejati dan palsu. Perilakunya telah menganut asas bebas nilai dan ukuran tertinggi bagi dirinya adalah pemuasan tuntas-purna semua keinginan dan kebutuhannya: *Ego mensura!*

3 Bdk. Paus Franciskus, *Evangelii Gaudium*, Milano: San Paolo, 2013, no. 60.

4 Lih. Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man*, Boston: Beacon, 1991, 3-5.

5 Bdk. *Id.*, *Counterrevolution and Revolt*, Boston: Beacon, 1972, 16.

Bagaimana perilaku yang hedonis-konsumeristik, individualis-egoistik dan rakus-korup mesti dijelaskan? Secara rasional hedonisme-konsumerisme dan individualisme-egoisme yang disebarkan secara masif melalui media sosial serta perilaku rakus-korup yang berulang-ulang dipertontonkan kepada massa memiliki sasaran dan tujuan yang sangat jelas, yaitu menimbulkan kerusakan tatanan rasio subyek, sehingga menghasilkan perilaku yang tidak kritis, apatis, egois, individualis dan korup. Jikalau asumsi demikian dapat diterima, maka wabah korupsi yang sedang terjadi merupakan konsekwensi dari infiltrasi ideologi besar dunia untuk menjadikan Indonesia sebagai *consumer state*.⁶

2. Korupsi sebagai Produk Ideologi

Kita telah menelaah bahwa permasalahan korupsi di tanah air secara hakiki berada dalam pusaran pertarungan ideologi global kontemporer yang saling berebut pengaruh untuk mendominasi dan mengeksploitasi *mensch lebensraum* dan semua sumber daya yang terkandung di dalamnya baik di ruang publik maupun privat, ruang teritorial atau konseptual.⁷ Peralihan bentuk dan strategi dominasi dan eksploitasi disebabkan oleh ruang yang semakin sempit untuk agresi dan okupansi wilayah, karena masyarakat dunia semakin menghargai hak dan martabat manusia serta kedaulatan masing-masing negara.

Agresi dan okupansi suatu wilayah berdaulat tidak hanya akan menimbulkan perlawanan dari penduduk lokal, tetapi juga memunculkan protes keras di dalam negeri agresor, embargo ekonomi dan militer, pemutusan hubungan diplomatik oleh banyak negara. Contoh terbaru (2014) dari reaksi berantai akibat agresi dan okupansi teritorial adalah embargo ekonomi, pembekuan asset dan pengisolasian Rusia, karena merampas Crimea dari Ukraina. Singkat kata, agresi dan okupansi wilayah memunculkan lebih banyak beban dan lawan daripada keuntungan dan persahabatan. Karena itu, untuk mempertahankan superioritas, dominasi dan eksploitasi, suatu negara dan ideologinya harus menemukan cara baru yang lebih manusiawi, familiar dan persuasif, namun bekerja secara efektif dan efisien.

Dewasa ini kita sedang menghadapi pola penaklukan, penjajahan, penghisapan semua sumber daya alam dan manusia, bentuk-bentuk pengontrolan serta sistem birokrasi dan administrasi gaya baru, *neokolonialisme*, *neoimperialisme* dan *neokeksploitasi*. Peralihan cara dan

6 Bdk. *Ibid.*, 16.

7 Dr. Valentinus, *Kritik Ideologi. Menyibak Selubung Ideologi Kapitalis dalam Imperium Iklan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, 159.

rupa kolonialisme, imperialisme, kontrol dan eksploitasi dipermudah oleh kehadiran berbagai macam perangkat teknologi yang semakin canggih. Karena itu, bukan tanpa alasan jika Herbert Marcuse menegaskan bahwa dunia modern kontemporer telah berada dalam cengkraman administrasi totalitarian⁸ dan dominasi teknologi⁹ yang sedang dilakukan oleh regim kolonialis global.

Dominasi, kontrol dan eksploitasi tidak lagi menampilkan diri dalam kehadiran tentara dan polisi asing yang lengkap dengan alat pencabut nyawa. Kekuatan asing kini hadir secara halus dan samar lewat konsep, gaya hidup, modal, barang kebutuhan, seni, standard hidup, cara kerja dan lain sebagainya. Penguasaan, penjajahan dan penghisapan sumber-sumber alam dan manusia kini hadir dalam sistem administrasi, birokrasi, investasi, standard nilai dan perangkat normatif yang harus diadopsi dan diinstallkan ke dalam pikiran dan mental subyek.¹⁰ Dominasi, kolonisasi, eksploitasi dan alienasi hadir secara ramah dan tersembunyi. Namun demikian, kehadiran yang halus, familiar dan samar tersebut memiliki daya paksa, daya kontrol, daya hancur dan daya keruk yang jauh lebih berbahaya dan mematikan terhadap nalar dan relasi sosial daripada agresi dan okupansi territorial.

Bagaimana dominasi, imperialisasi, kolonisasi, alienasi dan eksploitasi terhadap manusia dilangsungkan? Pihak adidaya menjalankan aktivitas *dehumanisasi* dan pelemahan nalar kritis subyek melalui propaganda yang agresif, massif dan sistematis di media komunikasi massa dengan terus menerus mempromosikan konsumerisme, hedonisme dan individualisme, mengintrodusir beragam prinsip teknologi dan gaya hidup yang seirama dengannya.¹¹ Dalam lingkup kebudayaan, penjajahan dan penguasaan terhadap nalar kritis dilakukan dengan menyelenggarakan beraneka macam program bantuan, kerjasama, supervisi, beasiswa, pinjaman, tukar-menukar pelajar/mahasiswa, pemberdayaan masyarakat dan kehadiran lembaga-lembaga asing.¹² Dari segi relasi dan interaksi antarbangsa dan negara, diterapkan beragam standard nilai, perangkat normatif dan persyaratan yang wajib dipenuhi. Akibatnya, pikiran manusia Indonesia hanya membatinkan beragam konsep tersebut

8 Lih. Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man*, 85, 105.

9 *Id.*, "From Ontology to Technology" dalam S.E. Bronner & Douglas M.K. Kellner (Eds.), *Critical Theory and Society. A Reader*, New York - London: Routledge, 1989, 121.

10 Dr. Valentinus, *op cit.*, 162-163.

11 Bdk. Herbert Marcuse, *Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud*, Boston: Beacon Press, 1974, 44-45.

12 Bdk. Jürgen Habermas, *Technik und Wissenschaft als Ideologie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, 48.

yang justru mendeskreditkan budaya, adat kebiasaan, kearifan lokal dan kepentingan nasional.

Akibat langsung dari penumpukan daya nalar dan penjajahan konseptual adalah kita tidak cerdas mencermati pola relasi dan interaksi antarbangsa, mengidap mentalitas *inlander* dan mengagung-agungkan kehebatan negeri lain. Yang memiriskan hati adalah anak-anak bangsa yang bekerja atau dipercaya orang asing cenderung pongah ketika bergaul dan berhadapan dengan saudara sebangsa serta bersikap acuh tak acuh terhadap budaya, tradisi, sistem nilai dan urusan dalam negeri. Mereka menjadi lebih asing daripada orang asing sendiri. Lebih memalukan lagi, para kaki tangan asing itu tidak sadar kalau mereka adalah kuli berdasi orang luar negeri, karena pikirannya sudah dicuci serta dimanipulasi dengan prestise semu dan status sosial palsu. Hasil penjajahan dan pempulan nalar memperlihatkan diri dalam perbudakan yang membahagiakan dan eksploitasi yang membangkitkan harga diri di antara anak-anak negeri.

Pertanyaan penting ialah ideologi macam apa yang memiliki kemampuan untuk melakukan *neokolonialisme*, *neoimperialisme*, *neo-eksploitasi*, administrasi total-otoritarian dan menciptakan kesadaran palsu yang menyenangkan di seluruh dunia dan Indonesia? Setelah pertarungan ideologi yang berdarah-darah antara liberalisme-kapitalisme dan marxisme-komunisme yang berakhir dengan keruntuhan tembok Berlin, simbol regim ideologi marxis-komunis, maka secara politik dan ekonomis dunia global berada dalam cengkeraman liberalisme dan kapitalisme. Meskipun demikian, dewasa ini liberalisme dan kapitalisme tidak dapat menjadi penentu skala nilai bagi warga global secara sepihak, mengingat masih banyak paham dan keyakinan lain, baik pada ranah sosio-filosofis maupun ranah religius yang harus dihadapi.

Secara konseptual *liberalisme* merupakan sebuah doktrin filosofis, sosial, politik dan ekonomis yang mengajarkan dan membela hak-hak asasi manusia dan kebebasan absolut setiap individu untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap bernilai dan berguna untuk aktualisasi diri. Secara historis liberalisme berakar pada visi agama Kristen tentang kewajiban umat kristiani guna mewujudkan Kerajaan Allah di dunia. Upaya perwujudan Kerajaan Allah tersebut dilangsungkan dengan mengolah alam dan menyelaraskan pemanfaatannya demi kebaikan dan keselamatan manusia.¹³ Jadi, dalam kristianisme ada keyakinan pada kemampuan manusia dan semangat kemajuan.

13 Thomas P. Neill, Ph. D, *The Rise and Decline of Liberalism*, Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1953, 33.

Dalam keharusan manusia untuk mengolah alam agar menjadi sumber-sumber penghidupan dan sarana keselamatan secara implisit terkandung konsep tentang hak manusia atas semua sarana yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan dan kebebasan untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat. Gagasan tentang hak, kebebasan dan martabat pribadi yang khas kristiani tersebut kelak akan dikembangkan oleh banyak pemikir Barat baik yang teistik maupun gnostik-ateistik dari abad-abad kemudian dan dirinci ke dalam berbagai jenis hak asasi.¹⁴ Jadi, hak dan martabat manusia lahir dari hakikatnya sebagai citra Allah sendiri.

Dari sekian jenis hak yang dirincikan, masyarakat abad pertengahan yang dimotori oleh kelas menengah, menuntut hak pribadi atas tanah dan perlindungan terhadap kebebasan pribadi.¹⁵ Setiap orang hendaklah diberi ruang dan peluang untuk memiliki tanah sebagai sumber penghidupan bagi dirinya maupun keluarganya, mengolah dan memanfaatkan hasilnya bagi kelangsungan hidupnya. Tanpa memiliki tanah, maka kelestarian hidup keluarga berada dalam ancaman maut. Singkat kata, kebebasan yang dituntut adalah kebebasan untuk mewujudkan semua kemampuan individu dan penggunaan semua sarana yang diperlukan untuk hidup sesuai dengan martabat pribadi sebagai citra Allah. Dalam perspektif ini, kebebasan mediovale berciri positif.¹⁶

Dalam perkembangan berikut, terutama di penghujung mediovale berkembang individualisme sebagai suatu konsekuensi dari tuntutan individu untuk memberikan ruang kebebasan absolut baginya dalam upaya mewujudkan diri tanpa harus terikat dengan ajaran gereja dan semua otoritas kekuasaan masyarakat feodal. Individualisme absolut terutama bertumbuh di lingkungan masyarakat kelas menengah yang anti-klerikal dan anti-aristokrat.¹⁷ Puncak dari gerakan antiklerikalisme dan anti-aristokrat adalah reformasi Lutheran yang disusul oleh Calvin dan Zwingli yang melahirkan aliran-aliran Protestan.

Gerakan reformasi yang didukung oleh kekuasaan politik, terutama para raja dan tuan tanah untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan pengaruh Roma merupakan cikal bakal dari kapitalisme. Selama abad pertengahan telah bermunculan kota-kota baru dengan pasar yang cukup hidup. Meskipun demikian, kehadiran kota-kota baru itu dan pasar-pasarnya barulah benih dari kapitalisme. Kapitalisme baru akan lahir

14 *Ibid.*, 34

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*, 35.

17 *Ibid.*, 38-39.

beriringan dengan kemunculan agama Protestan. Apa artinya?

Selama masa Reformasi tanah milik gereja yang sangat luas dibagi-bagikan oleh para pangeran dan dijadikan milik pribadi. *This freeing of the land from institutional ownership was like dynamiting a log jam on a river. It removed one of the obstacles to the development of a market economy, which we shall see later is an essential part of Liberalism, and putting additional vast amounts of land under individual ownership was a big step in the direction of capitalistic agriculture – the element from which came the first demands for free trade.*¹⁸

Secara sosial-politik, liberalisme memahami masyarakat dan negara sebagai hasil kesepakatan antarindividu yang berdiam di suatu wilayah dan terus berada dalam konflik dan pertarungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melestarikan eksistensi diri.¹⁹ Untuk mencegah konflik dan perang, maka individu-individu sepakat menyerahkan sebagian dari hak-haknya kepada sebuah lembaga untuk mengatur, menata, mengawasi, memerintah dan bahkan menghukum bila terjadi pelanggaran atas kesepakatan. Lembaga tersebut adalah negara.²⁰ Meminjam istilah Hobbes, negara adalah Leviathan, mahakarya nalar yang lahir dari kesadaran *bellum omnes contra omnia* yang disebabkan oleh kebebasan absolut individu.²¹

Secara ekonomi, liberalisme mengedepankan tata niaga *laissez-faire* sebagai wujud dari apresiasi terhadap kebebasan individu dan menghindari campur tangan negara. Landasan argumentasinya adalah keidentikkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Negara harus membiarkan kompetisi antarindividu untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan hasil, karena dengan cara itu kepentingan umum akan terwujud secara alamiah. Wujud konkret dari sistem ekonomi liberal ialah *kapitalisme*.

Secara hurufiah kapitalis (Latin *caput* = kepala) mengacu pada upaya untuk mempertahankan kepala atau secara simbolis melestarikan kehidupan individu sebagai subyek yang bebas-merdeka, otonom dan unik dalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, kapitalisme merupakan doktrin tentang relasi dan interaksi serta praksis ekonomi yang berkenaan dengan hak setiap orang dan kelompok untuk melakukan aktivitas jual-beli atas hak milik dan hasil kerjanya di pasar bebas. Pasar harus bebas dari segala aturan dan campur tangan negara,

18 *Ibid.*, 43.

19 Bdk. Thomas Hobbes, *Leviathan*, New York: Oxford University Press, 1996, 86-95.

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

karena menjadi tolok ukur bagi setiap produk²² dan kepentingan pasar menjadi hukum tertinggi.²³ Ruang bagi setiap orang dan kelompok untuk mengelola modal, melipatgandakan modal dan keuntungan serta menginvestasikannya kembali harus diberi kebebasan maksimal. Kapitalisme yakin bahwa harta-benda mempunyai nilai dan dapat diuangkan, semua relasi dan interaksi antar-manusia selalu dilandasi dan diatur oleh pertimbangan modal serta pelipatgandaannya. Jadi, modal adalah sebab, motif dan tujuan dari setiap aktivitas kerja manusia.

Aktivitas melipatgandakan modal dan keuntungan menjadi mudah berkat alat-alat teknis yang sanggup berproduksi dan menghasilkan produk tanpa batas. Akibatnya, secara sosial masyarakat terbagi ke dalam dua kelas sosial yang saling berhadapan: kelas pekerja dan kelas pengusaha,²⁴ rakyat jelata dan kaum penguasa, dan secara ekonomis terbentang jurang antara hasil produksi dan daya konsumsi. Bayang-bayang kehancuran ekonomi berada di depan mata. Untuk mencegah kehancuran dunia industri, maka kaum kapitalis mencari konsep baru, strategi baru dan format baru yang mampu memacu permintaan dan konsumsi masyarakat serta pembukaan pasar-pasar baru di seluruh dunia.²⁵

Konsep baru ialah stimulasi dan manipulasi insting, meredam nalar, menciptakan kebutuhan palsu.²⁶ Strategi yang dilakukan ialah merayu, membuat ragu, membuat malu, mendorong rasa tak percaya diri pada apa yang dimiliki dan sekaligus memberikan tip dan terapi lewat produk-produk terberi. Singkat kata, kapitalisme menciptakan *credo* baru berupa konsumerisme dan hedonisme dan memakai iklan sebagai medium propaganda untuk menciptakan kebutuhan palsu, idola palsu, event-event palsu, kesenangan semu²⁷ di kalangan konsumen global guna menciptakan sebuah *consumer society* yang berskala mondial.²⁸

Peradaban kontemporer sedang berhadapan dengan penaklukan gaya baru oleh para penganut setia *neo*-kolonialisme dan *neo*-imperialisme. Mereka mengalihkan palagan dari ruang terbuka ke dunia maya, dari zona teritorial ke wilayah konseptual.²⁹ Mesin perang masih diandalkan

22 Karl Marx, *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*, Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt – Wien: Europa Verlag, 1939, 1941, 302.

23 Valentinus Saeng, CP, *Herbert Marcuse. Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Jakarta: Gramedia, 2012, 130.

24 Marx-Engel, *Werke*, Bd. 3 (*Deutsche Ideologie*), Berlin: Dietz, 1958, 76.

25 Analisa yang tajam dan rinci dalam Jean Baudrillard, *The Consumer Society*, London: SAGE Publications, 1998.

26 Bdk. Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man*, 3-5.

27 Lih. Jean Baudrillard, *The Consumer Society*, London: SAGE Publications, 1998, 125-126.

28 Herbert Marcuse, *Conterrevolution and Revolt*, 23.

29 Dr. Valentinus, *op cit.*, 124-126.

namun skalanya kian berkurang karena merugikan. Sementara dominasi dan eksploitasi gaya baru lebih menguntungkan, karena tidak membuat korban merasa gerah dan marah; malah para korban semakin bergairah dan banyak tingkah. Prinsip hidup yang digemborkan oleh regim liberal-kapitalis kepada para korban bermotto: *consumo, ergo sum* – saya mengkonsumsi, maka saya ada.³⁰ Neokolonialisme dan neo-imperialisme kini membangkitkan gengsi dan harga diri, menyulap korban dari orang biasa menjadi selebriti dunia. Itulah *alienasi konsumsi*,³¹ penjajahan yang membahagiakan.

3. Kehancuran Tatanan Rasio

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang mengandung arti hancur, busuk, lapuk, rusak. Terminologi korupsi digunakan baik pada ranah filsafat metafisik (ontologi dan epistemologi) maupun ranah etika dan moral. Dalam pengertian metafisika, istilah korupsi dikenakan pada *ens materialis*, ada material yang dapat dicerap oleh panca indra dan menjadi asal muasal bagi semua pengetahuan indrawi. Secara filosofis dikatakan bahwa korupsi merupakan ciri dasar semua ada fisik-indrawi. Sementara itu, dalam khazanah etika dan moral, terminologi korupsi dipakai untuk menunjukkan kehancuran tatanan akal budi, kelapukan kesadaran, ketumpulan nurani, *corruptio mentis* yang dituangkan dalam sikap dan perilaku individu.

Landasan epistemologis kehancuran rasio bertumpu pada prinsip jiwa sebagai lentera badan. Meskipun kita tidak mengenal dualisme jiwa badan, karena badan adalah badan yang menjiwa dan jiwa ialah jiwa yang membadan, secara niscaya tetap berlaku distingsi yang bertumpu dan mengalir dari diferensi generis dan diferensi spesifik. Manusia *sui generis* adalah binatang, kebinatangan yang mewujud dalam badan dengan segala kebutuhannya. Namun ditinjau dari sudut spesies, manusia adalah *animal rationale*, makhluk berbudi, binatang berkesadaran.³² Rasionalitas adalah ciri khas, hakikat, tanda penunjuk dan sekaligus daya penggerak bagi seluruh aktivitas badaniahnya. Karena itu, pada lingkup etis-moral, keputusan pribadi serta perwujudannya dalam sikap hidup dan tingkah laku merupakan ekspresi, manifestasi, realisasi dari dan eksekusi atas konsep, keyakinan, kesadaran dan kepercayaan terhadap suatu (sistem) nilai.

30 *Ibid.*, 233.

31 *Ibid.*, 241.

32 Bdk. Aristotele, *Etica Nicomachea* (I, 13), Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 1996, 135-141.

Di dalam setiap keputusan dan tindakan konkret individu diandaikan secara niscaya unsur penalaran, pengertian, pemahaman, pilihan dan persetujuan, sehingga keputusan dan penerapannya dalam ruang hidup individual dan ruang lingkup sosial memiliki bobot etis-moral. Memiliki bobot etis-moral berarti bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Bobot moral dari suatu keputusan dan pelaksanaannya semakin bertambah manakala sifat dan ruang cakupannya bersinggungan dengan institusi publik dan menyangkut kepentingan hidup bersama.

Adalah mustahil bahwa sebuah kebijakan publik dari lembaga pemerintahan negara muncul begitu saja tanpa ada pertimbangan dan perhitungan. Justru karena karakter dan sasarannya adalah publik, maka kita berkeyakinan bahwa keputusan dan kebijakan apapun secara niscaya telah melewati beragam fase eksaminasi *dubitatio* Cartesian³³: perdebatan soal rasional - irasional, pertimbangan etis-moral baik - buruk, perhitungan ekonomis untung - rugi dan penilaian manfaat bergunamubazir. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam perbuatan korupsi merupakan sebuah keputusan rasional, lahir dari niat jahat pribadi untuk berbuat melawan hati nurani dalam tata batin dan norma hukum dalam realitas dan ranah sosial. Apa penyebab kerusakan rasio?

Kehancuran tatanan rasio koruptor merupakan kombinasi dari kekerdilan nurani subyek, keburukan moral yang menggerogoti semesta relasi serta interaksi di lingkungan sosial dan konsekwensi dari pusaran pertarungan ideologi global untuk memperebutkan hegemoni dalam ruang kesadaran maupun ruang teritorial. Dalam lingkup subyek, kekerdilan nurani merupakan konsekwensi dari cacat pusaka atau dalam bahasa religius, dosa asal yang bersifat laten. Secara prinsipil dan eksistensial manusia membawa-serta dalam dirinya kecenderungan untuk berbuat buruk, termasuk melakukan tindak korupsi. Karena itu, setiap agama dan kebudayaan berupaya meminimalisir kecenderungan terhadap keburukan melalui proses pendidikan budi pekerti guna mempertajam kesadaran nurani, sehingga dalam hidup sehari-hari manusia mengutamakan kebajikan dan mampu menghindarkan diri dari keburukan moral atau tindak kejahatan.

Sayang sekali bahwa dalam lingkup sosial Indonesia, pendidikan budi pekerti, budaya kebajikan, perilaku jujur, adil dan terpuji kurang mendapat tempat, bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun. Sekolah yang secara prinsipil dan praksis *an sich* harus menjadi ujung tombak, batu penjurur dan kawah candradimuka dalam pendidikan etika dan moral, mengutamakan sikap jujur, tekun, adil, obyektif, menghargai

33 Bdk. Descartes, *Discorso sul metodo*, (trad. Maria Garin), Bari: Laterza, 1998, 25-27.

kemajemukan, menanamkan rasa kemanusiaan malah menjadi pelopor dalam bertindak curang, bersikap tidak adil, mendorong perilaku rasis dan diskriminatif, turut memacu sikap yang antikemajemukan dan antikemanusiaan.

Dunia pendidikan di tanah air telah beralih fungsi dari laboratorium sosial yang *pro* kebajikan, kejujuran, obyektivitas, keadilan, persamaan harkat dan martabat manusia tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi *locus delicti* dari berbagai macam perbuatan buruk secara moral dan tindakan melawan hukum. Sejak usia dini dunia pendidikan nasional telah menjejali kesadaran subyek bina dengan pola pikir dan tata perilaku yang dikotomistis, rasis dan diskriminatif seperti terungkap dalam istilah sekolah negeri dan sekolah swasta, kelompok mayoritas dan minoritas, pribumi dan non pribumi, Jawa dan luar Jawa serta berbagai macam sebutan dan simbol.

Dari sudut pembatinaan nilai-nilai etis-moral dan pembentukan karakter subyek bina, praksis yang berlaku umum di sekolah dan kampus bukanlah penajaman kesadaran untuk bekerja keras, bersikap tekun dan jujur. Sekolah dan kampus malah mendorong pelapukan kesadaran dengan membiarkan nyonteks massal pada saat Ujian Nasional dan memperjual-belikan ijazah. Staf pengajar pun banyak yang bermain nilai untuk mendapatkan uang dan memfasilitasi bisnis skripsi, tesis dan disertasi, melakukan pungutan liar dan kongkalikong dengan anggaran pendidikan. Semua kejahatan moral tersebut yang dipelopori oleh mereka yang secara moral, sosial dan politis harus ditiru dan digugu terjadi secara sistematis, terstruktur dan berskala nasional. Jadi, *corruptio mentis* manusia Indonesia telah disemai sejak pendidikan di sekolah dasar.

Dari situasi pendidikan yang serba korup itu, jangan heran bila hasil akhir dari dunia pendidikan nasional yang sudah tidak mengindahkan kerja keras, ketekunan, kejujuran, keadilan, obyektivitas, harkat dan martabat pribadi, hak dan kewajiban adalah anak-anak bangsa yang dalam semua praksis hidupnya menganut prinsip *homo homini lupus* dan pola relasi nepotis, kolusif, rasis, diskriminatif, korup dan logika ekonomi-kekuasaan. Semesta relasi dan interaksi individu selalu tunduk pada kepentingan kekuasaan dan uang, baik dalam artian penguasa yang memegang otoritas maupun kelompok yang mempunyai daya tawar lebih kuat. Jadi, praksis yang berlangsung di ruang publik Indonesia adalah penghilangan distingsi antara yang rasional dan irrasional, baik dan buruk, adil dan durjana, halal dan haram.

Demi kekuasaan dan kesenangan, kekayaan dan keamanan kaum penguasa, tuntutan iman dan kepercayaan untuk berbuat kebajikan, kewajiban moral sosial untuk mengutamakan kesejahteraan umum berlandaskan kemanusiaan, keadilan sosial dan keadaban dinetralisir dan dibatalkan. Korupsi telah dikeluarkan dari larangan moral agama dan

pantangan etika; korupsi berada pada tataran estetika dan masuk dalam ranah sensualitas belaka. Sungguh, bangsa Indonesia sedang mengalami senja kala roh kemanusiaan, mati suri aura keadaban, kehilangan energi keadilan, kebijaksanaan dan kearifan yang menjadi sesanti dan intisari Pancasila.

4. Banalitas Korupsi

Dari wacana yang mengemuka dan tata laksana pemerintahan negara yang sudah berjalan lama ternyata korupsi dianggap dan dilakukan oleh masyarakat dan pejabat sebagai bunga administrasi belaka. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency International* tahun 2014, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menduduki peringkat 118 dari 197 negara yang disurvei.³⁴ Dari indeks tersebut bisa dikatakan bahwa korupsi telah menjadi penyakit akut dan bencana nasional. Keakutan dan status bencana itu dikonfirmasi oleh praktik yang berlangsung dalam tata kelola pemerintahan negara. Kita dapat dengan mudah melihat atau mengalami sendiri bahwa mulai dari jalan raya hingga ruang-ruang kerja, uang siluman dan pungutan sudah biasa berseliweran.

Semua dipersepsi dan disikapi sebagai transaksi yang mentradisi dalam logika relasi dan interaksi yang diatur dan dikelola seturut logika hukum penawaran dan permintaan, produksi dan konsumsi, kebutuhan dan pemenuhan antara rakyat dan pejabat.³⁵ Korupsi seakan-akan menjadi menu harian yang wajib tersedia di atas meja penguasa yang telah bersumpah untuk menjadi abdi negara dan melayani kepentingan seluruh bangsa tanpa pilih kasih dan pandang bulu demi mewujudkan negara-bangsa yang adil dan merata. Itulah paradoks Indonesia, bangsa yang secara tegas dan lugas menempatkan iman kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa dalam *credo* ideologi nasionalnya.

Berdasarkan praksis yang berjalan dalam keseluruhan jalinan relasi dan interaksi semua warga sebangsa, secara sosial korupsi tampak menciptakan zona aman sebagai tempat perlindungan dari bahaya kelaparan, kemiskinan, kekurangan, keterisolasian, ketertinggalan, *stigma* kampungan dan gagap ketenaran. Korupsi menggemukkan badan, menambah pundi-pundi kekayaan, memperbanyak teman-rekan-kenalan, membuat hidup keluarga serta kerabat serba aman, nyaman dan mapan. Buah-buah korupsi berhasil menaikkan gengsi dan harga diri, membuat percaya diri tatkala menjalin relasi dan berinteraksi, sehingga berhasil membuat pelaku masuk dalam kalangan selebriti.

34 Lih. <https://www.transparency.org/cpi2014/results>.

35 Kompas. *op cit.*, Bab I: Surga Para Koruptor, Bab II: Bancakan Uang Rakyat di Senayan, 3-47, 48-56.

Dari aspek kesadaran moral, korupsi tidak lagi menimbulkan rasa bersalah yang membuat gundah maupun rasa takut akan sumpah serapah rakyat yang marah. Ketika malam tiba, mata tetap bisa terpejam tanpa beban pikiran, walaupun dinamika hidup harian sarat dengan “transaksi” yang *an sich* bertentangan dengan hati nurani dan iman kepercayaan. Bahkan dari kesan dan pesan yang diisyaratkan oleh bahasa badan para koruptor pesakitan, terpancar rasa bangga karena menjadi aktor-aktris dadakan yang menghiasi pemberitaan televisi dan koran. Kalaupun mereka menangis, tangisan itu bukanlah tanda penyesalan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan karena dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dan bayaran yang akan berikan.

Manakala tindak korupsi tak lagi mengusik nurani, ketidakwajaran dianggap sebagai kenormalan, deviasi diperlakukan sebagai substansi dalam tata kelola negara, maka bangsa kita saat ini berhadapan dengan, meminjam istilah Hannah Arendt, banalitas korupsi.³⁶ Korupsi menjadi banal justru karena sikap pelaku yang sama sekali tidak ragu dan ambigu dalam melakukan sesuatu yang jelas keliru. Secara manusiawi pelaku korupsi bukanlah orang yang bertingkah “aneh-aneh”, berkepribadian ganda atau munafik seperti yang kerap dituduhkan. Koruptor merupakan pribadi yang berperilaku waras, selalu awas dan berpikir cerdas, bersikap ramah dan bahkan rajin beribadah. Jika demikian, apa yang menjadi penyebab mereka melakukan korupsi?

Sikap wajar pelaku dalam melakukan tindak korupsi berasal dari pola berpikir yang tidak kritis dan keyakinan moral yang bias atau paham moral yang dualistik, di mana keyakinan moral dan kesadaran personal dalam ranah privat dipisahkan secara definitif dari tanggung jawab sosial pelaku dalam ruang publik. Menurut ukuran moral pribadi, seseorang dapat saja tidak setuju dan tidak nyaman dengan korupsi. Tetapi, karena korupsi sudah menjadi kewajaran dalam administrasi dan birokrasi pemerintahan, maka individu tersebut memaknai korupsi yang dilakukan sebagai wujud dari loyalitas dan tanggung jawab pribadi terhadap sistem dan atasan yang telah memberikan wewenang dan kepercayaan. Jadi, para koruptor adalah Eichmann kontemporer.

Tidak kritis bukan hanya mengacu pada kadar kemampuan nalar, tetapi secara khusus pada kemandulan daya refleksi, kemampuan elaborasi, kedalaman konsepsi, pemahaman tentang substansi yang berkembang dalam realitas terberi. Pelaku bekerja semata-mata berdasarkan apa yang digariskan dan menurut kebiasaan yang dijalankan. Dia memposisikan diri sekedar sebagai instrumen kerja yang bebas dari

36 Bdk. Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem. A Report on Banality of Evil*, New York: Penguin Books, 1994, 152.

kewajiban etis-moral, tanpa tanggung jawab dan tanpa kontribusi pribadi. Jangan heran bila berkembang persepsi di kalangan elit politik dan pejabat negara bahwa korupsi hanya sebuah arisan: arisan untuk berbagi dana anggaran negara dan berebut komisi dari aneka macam kontrak karya di antara elit penguasa, arisan mengemplang pajak oleh kalangan pengusaha dst.. Jadi, korupsi menjadi banal karena tiada hubungan antara keyakinan moral pribadi dan tanggung jawab sosial dalam tugas teremban.

5. Quo vadis Indonesia?

Infiltrasi ideologi besar dunia terutama liberalisme dalam ranah politik dan kapitalisme dalam sistem ekonomi nasional secara visual sulit dibantah dan justru sedang menancapkan pengaruhnya dalam kesadaran, tingkah laku anak bangsa dan tata kelola pemerintahan negara meskipun Indonesia menganut ideologi Pancasila. Penguasa liberal-kapitalis global terus meneror benteng kesadaran individu yang telah dibangun melalui pendidikan nilai yang bernuansa religius, kearifan lokal dan ideologi Pancasila yang mengutamakan tenggang rasa, tolong menolong, gotong royong, hidup sederhana, rasa senasib dan sepenanggungan, ikatan kekerabatan dan persaudaraan, sikap tahu batas dan menghargai orangtua dan mereka yang dianggap bijaksana.

Teror yang dilakukan berupa konsep³⁷ pemerintahan yang demokratis liberal, isu hak-hak asasi manusia, kebebasan individu, pasar bebas, standard nilai, deregulasi aturan perundang-undangan nasional yang dinilai proteksionis, nasionalis dan menghalangi kepentingan kaum kapitalis. Dari segi peraturan, politik dan kebudayaan, regim liberal-kapitalis memaksakan perangkat normatif yang *pro* pasar bebas, kebebasan pers secara absolut atas nama kebebasan informasi, pertukaran pelajar dan budaya, bantuan beasiswa dan teknis, utang luar negeri, kehadiran dan karya lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional dan terutama film-film serta agresivitas iklan media sosial.

Tampak sekali bahwa infiltrasi ideologi neoliberal-kapitalis telah berhasil menerobos ke dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberhasilan itu tercemin pada perebutan pengaruh antara teknokrat plus pemikir *neoliberal* dan kalangan yang menganut sistem ekonomi kerakyatan di jagat perpolitikan nasional, euforia kebebasan yang diwujudkan dalam UUD Negara RI 1945 hasil referendum serta aturan perundang-undangan turunannya sejak reformasi bergulir. Infiltrasi ideologi liberal-kapitalis terdapat pada pasal 18 ayat 2, 5 dan 6 tentang

37 Bdk. David McLellan, *Ideology*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986, 65-79.

otonomi daerah dan *wewenang* pemerintah daerah *menentukan kebijakan sendiri*, pasal 20A ayat 1 tentang *fungsi anggaran* DPR, pasal 33 ayat 4 tentang *demokrasi ekonomi*. Melihat keberhasilan kaum liberal-kapitalis mengubah haluan perpolitikan dan sistem ekonomi nasional dalam UUD NRI 1945, apakah Indonesia masih berani mendakukan Pancasila sebagai ideologi nasionalnya?

Dalam praksis bermasyarakat pola hidup yang konsumeristis dan hedonistis telah menjadi ciri khas warga sebangsa mulai dari kota hingga pelosok Nusantara. Siang-malam pikiran, kesadaran dan panca indra warga sebangsa terus menerus disuguhi dengan tontonan sinetron yang memamerkan kemewahan, kemegahan, kekayaan, kegemerlapan. Pada saat bersamaan tontonan sinetron demikian diselingi dengan tayangan iklan yang mengumbar ketidaknyamanan dan ketakpercayaan diri.³⁸ Sesaat kemudian, iklan-iklan itu menampilkan keajaiban atau mukjijat dari yang mustahil menjadi nyata, *from nothing to be something*³⁹ melalui beragam tips dan produk. Dewa penyelamat dari rasa serba kurang adalah produk industri kapitalis yang harus dibeli dan dikonsumsi. Hasil dari terapi produk adalah sensasi bak selebriti yang mengalir darah para korban dan terealisasi dalam cara berpakaian, cara berjalan dan cara berdandan, merek pakaian dan merek kendaraan, vitamin yang dikonsumsi dan hiburan yang dinikmati.

Manusia Indonesia terus dipaksa oleh regim kapitalis untuk menjadi konsumen yang tidak pernah puas. Tuntutan hidup dari hari ke hari dikondisikan semakin tinggi, sementara gaji tidak sebanding dengan kebutuhan dan permintaan anak dan isteri. Dalam situasi yang dilematis, opsi yang tersedia adalah *atau* tetap berpegang teguh pada keyakinan moral pribadi yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab *atau* menenggelamkan diri dalam arus korupsi yang mengalir semua bentuk relasi dan interaksi dalam birokrasi. Propaganda konsumerisme dan hedonisme lewat media massa berhasil merobohkan benteng moral-spiritual manusia Indonesia, sehingga banyak yang memilih opsi ikut arus korupsi demi membahagiakan keluarga dan sanak saudara. Korupsi menjadi *modus vivendi* manusia Indonesia. Lalu, *Quo vadis* Indonesia?

6. Urgensi Pendidikan Kritis

Internalisasi konsumerisme dan hedonisme sebagai pola hidup dan pola tindak manusia Indonesia dalam hidup sehari-hari menandakan

38 Lih. Jules Henry, *Culture against Man*, New York: Random House, 1963, 61-62.

39 Dr. Valentinus, *op cit.*, 186.

40 Analisa yang cukup detil dapat dibaca dalam karya Dr. Valentinus, *Menyibak Selubung Ideologi Kapitalis dalam Imperium Iklan....*

bahwa infiltrasi ideologi liberal dan kapitalis telah berhasil dengan baik. Rentetan kasus korupsi yang terungkap dan melibatkan elit politik bangsa dan masivitas praktek korupsi dalam birokrasi memberikan gambaran yang jelas bagaimana tatanan rasio kaum elit dan terpelajar telah dilumpuhkan dan dikendalikan oleh paham lain yang secara hakiki bertentangan dengan nilai-nilai rohani dan paham Pancasila.

Menghancurkan sebuah bangsa di era kontemporer tidak mesti dengan mengerahkan tentara dan senjata, tetapi cukup dengan menggunakan media komunikasi massa, strategi propaganda iklan-pariwara, doktrin ideologis, hutang luar negeri dan investasi modal. Lewat faktor-faktor tersebut satu negara mampu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi pikiran dan kesadaran, gambaran diri dan masyarakat, pola relasi dan interaksi suatu bangsa sesuai kepentingannya dan bahkan siapa yang menjadi pemimpin negara. Regim liberal-kapitalis kontemporer sedang menggunakan strategi ini untuk menghancurkan sistem nilai, kearifan lokal, ideologi dan iman kepercayaan bangsa Indonesia.

Asumsi tentang intervensi regim liberal-kapitalis dalam jagad kesadaran anak bangsa melalui media propaganda pariwisata di atas dijustifikasi oleh peningkatan jumlah dana yang digunakan untuk iklan di media massa tanah air. Menurut data *AB Nielsen Indonesia*, pada pertengahan pertama dari 2011, investasi di bidang periklanan bertumbuh 17% dengan total dana yang digunakan kurang lebih 33,4 triliun rupiah. Apakah investasi yang menyedot dana demikian besar melulu investasi murni atau bersembunyi interes global untuk menjadikan bangsa kita sebagai negara konsumen murni? Terlalu naif bila dana puluhan triliun rupiah yang dihabiskan untuk iklan hanya bertujuan mempromosikan produk-produk terbaru.⁴⁰

Regim neoliberal-kapitalis menginginkan pembusukan sistematis kondisi mental, rasional dan spiritual yang berisi sikap ulet dan tangguh manusia Indonesia dalam merealisasikan keamanan yang mantap dan kesejahteraan yang adil dan merata. Pola pikir, sikap dan tindak-tanduk manusia Indonesia yang biasa setia kawan, tenggang rasa, ramah, polos, jujur, tahan banting, ulet berjuang diluluhlantakkan dan digantikan dengan pola pikir, sikap dan gaya hidup yang egois, individualis, acuh tak acuh, serba menghalalkan segala cara dan mudah menyerah. Jadi, dengan menyerang jantung pertahanan individu, maka Indonesia akan ambruk dengan sendirinya.

Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dan menetralkan pengaruh ideologi liberal-kapitalis? Dari perspektif ketahanan mental-ideologis, bagaimana manusia Indonesia mampu menjadi pribadi yang

41 Bdk. Lemhannas, *Konsepsi Ketahanan Nasional*, (Modul 06). Jakarta: Lemhannas, 2013, 11.

cerdas, bernas, awas, bebas, humanis, setia kawan dan mandiri? Semua akan menjawab: “dengan pendidikan”. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan nasional telah menjadi medan perebutan kekuasaan dan tarik menarik kepentingan dari berbagai kekuatan sentripugal di negeri ini. Slogan *sapere aude* diganti dengan *scientia potestas est*, interest politik-ideologis-religius lebih dominan dalam dunia pendidikan daripada kepentingan pencerdasan dan pemanusiaan anak bangsa. Lembaga pendidikan dialihfungsikan dari instrumen humanisasi menjadi kuda troya untuk merebut kekuasaan. Karena itu, kalau praksis yang berlangsung dalam dunia pendidikan masih tetap seperti saat ini, maka niat melahirkan manusia Indonesia yang unggul, ulet, solider, bermartabat, mandiri dan berkarakter hanya sebuah *utopia*.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah *dekonstruksi* pendidikan nasional yang selalu afirmatif, diskriminatif, parsial dan sarat dengan kepentingan yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Pemimpin negeri ini dan semua kelompok masyarakat harus mendorong dan mendukung *rekonstruksi* pendidikan nasional yang mencerdaskan, menumbuhkembangkan nalar dialektis-negatif-kritis, mengutamakan kejujuran dan obyektivitas melampaui kepentingan ideologis apapun. Semua pihak harus legawa menjadikan nalar sebagai pengadilan terakhir bagi perwujudan diri setiap orang dan kebenaran sebagai penuntunnya. Berikanlah ruang bagi masing-masing orang untuk belajar bahkan apabila melakukan kesalahan dan kegagalan, karena *qui errat rogat* - siapa yang berbuat salah dan gagal akan terus belajar dan bertanya untuk mencapai kebenaran.

Aspek lain yang perlu dilakukan ialah semua pihak harus mengubah keyakinan mengenai konsep ketahanan.⁴¹ Ketahanan sejati tidak terletak pada kemutakhiran senjata dan jumlah tentara, tetapi bergantung pada kesadaran, mengacu pada aspek mental, rasional dan spiritual. Ketahanan sejati berada dalam pikiran, kesadaran, hati sanubari setiap individu yang bebas, bermartabat, mandiri dan berkarakter. Seseorang yang memiliki daya tahan kokoh dan ulet akan senantiasa berpikir kritis, menghargai sesama, percaya diri, sarat pertimbangan dan mandiri. Dia teguh dalam pendirian, lemah lembut dalam cara dan selalu terbuka terhadap sesama. Ia adalah manusia yang berpikir global, bertindak lokal.

Kalau kita menginginkan warga negara yang tahan uji dan siap berkompetisi, maka semua komponen bangsa harus mendidik manusia Indonesia menjadi individu yang berpikir cerdas, berwawasan humanis, bersikap ksatria, terbuka terhadap perbedaan, berani berdialog, mandiri dan bertanggung jawab terhadap hidupnya dan kelangsungan bangsanya. Semangat *pro patria* akan tumbuh dan mekar dalam sanubari hanya ketika setiap orang merasa dimanusiakan di tanah airnya oleh negara. Itulah rahasia umur panjang sebuah peradaban.

7. Penutup

Epidemi korupsi yang telah menjadi banal di seluruh dunia dan Indonesia merupakan salah satu kesuksesan terbesar dari proyek rekayasa regim liberal dan kapitalis kontemporer. Lihat yang sedang terjadi: warga dunia, termasuk masyarakat Indonesia, menghidupi euforia bagai ratu dan raja sehari di *mall* dan *plaza* untuk menghabiskan uang dan mengurus tabungan. Kesadaran kritis telah membusuk dan membeku di hadapan beragam produk yang dijejalkan ke dalam pikiran dan panca indra.

Kebusukan dan kehancuran tatanan rasio menampilkan diri dalam kebusukan dan kehancuran sistem sosial yang mengatur dan menata jalinan relasi dan interaksi manusia Indonesia. Korupsi pun mewabah karena pikiran dan kesadaran individu telah dicuci dan direkonstruksi melalui bermacam propaganda di media massa untuk menghabiskan semua produk industri kapitalis, walaupun terdapat kesenjangan antara gaji bulanan dan tuntutan kebutuhan hidup harian atau ada jurang antara impian dan kenyataan.

Wabah korupsi hanya dapat dihadapi ketika manusia Indonesia menjadi pribadi yang cerdas, kritis, awas, humanis, solider dan berkarakter. Namun, untuk menjadi anak bangsa yang cerdas dan bernas, menghargai kemanusiaan, kemajemukan, keadilan, kemandirian dan kebenaran, dekonstruksi pendidikan yang afirmatif, statis, diskriminatif, parsial dan ritualis dan rekonstruksi pendidikan yang kritis, dialektis, dialogis, humanis dan obyektif merupakan suatu keniscayaan. Dengan kata lain, salah satu sarana terbaik untuk mengembalikan bangsa Indonesia sebagai tuan di rumah sendiri adalah pendidikan yang memberi ruang bagi nalar kritis untuk berkembang dan menuntun langkah hidup bersama sebagai negara-bangsa. Nalar kritis harus menjadi lentera kemanusiaan dan peradaban kita.

* **Valentinus Saeng**
Dosen filsafat STFT Widya Sasana, Malang. Email: mualangboy@gmail.com.

BIBLIOGRAFI

- Arend, Hannah. *Eichmann in Jerusalem. A Report on Banality of Evil*, New York: Penguin Books, 1994.
- Aristotele, *Etica Nicomachea* (I, 13), Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 1996.
- Baudrillard, Jean. *The Consumer Society*, London: SAGE Publications, 1998.
- Bronner, S.E. & Douglas M.K. Kellner (Eds.), *Critical Theory and Society. A Reader*, New York - London:

- Descartes, *Discorso sul metodo*, (trad. Maria Garin), Bari: Laterza, 1998.
- Dr. Valentinus, *Kritik Ideologi. Menyibak Selubung Ideologi Kapitalis dalam Imperium Iklan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Franciskus, Paus. *Evangelii Gaudium*, Milano: San Paolo, 2013.
- Henry, Jules. *Culture against Man*, New York: Random House, 1963.
- Habermas, Jürgen. *Technik und Wissenschaft als Ideologie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*, New York: Oxford University Press, 1996.
- <https://www.transparency.org/cpi2014/results>.
- Isra, Saldi. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Penerbit Kompas 2009.
- Kompas, *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.
- Kompas, *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.
- Lemhannas, *Konsep Ketahanan Nasional*, (Modul 06). Jakarta: Lemhannas, 2013.
- Marcuse, Herbert. *Counterrevolution and Revolt*, Boston: Beacon, 1972.
- _____, "From Ontology to Technology" dalam S.E. Bronner & Douglas M.K.
- Kellner (Eds.), *Critical Theory and Society. A Reader*, New York - London: Routledge, 1989.
- _____, *Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud*, Boston: Beacon Press, 1974.
- _____, *One-Dimensional Man*, Boston: Beacon, 1991.
- Marx-Engel, *Werke*, Bd. 3 (*Deutsche Ideologie*), Berlin: Dietz, 1958.
- Marx, Karl. *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*, Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt - Wien: Europa Verlag, 1939, 1941.
- McLellan, David. *Ideology*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
- Routledge, 1989.
- Neill, Thomas P. Ph. D, *The Rise and Decline of Liberalism*, Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1953
- Saeng, Valentinus. *Herbert Marcuse. Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Jakarta: Gramedia, 2012.